



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

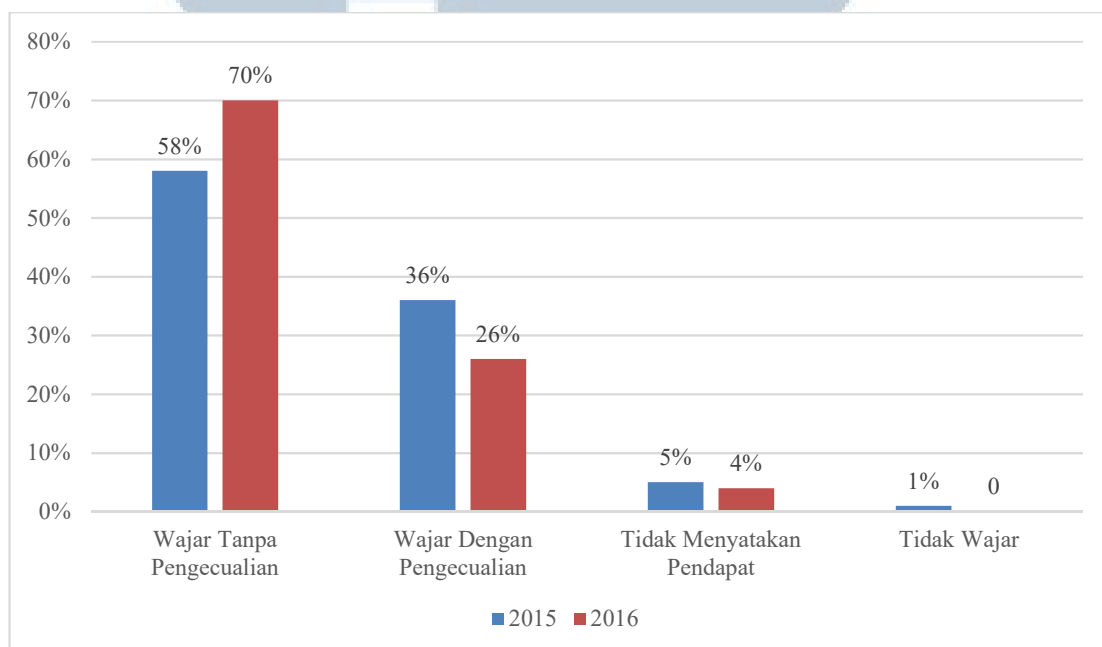
### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2015, seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (*accrual basis*). Direktur Jendral Keuangan Daerah, Yuswandi A. Temenggung, menyatakan SAP berbasis akrual yang telah ditandatangani mengharuskan pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan SAP per 1 Januari 2015. Dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual adalah PP No. 71/2010 tentang SAP, sebagai amanat dari UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. UU No.17/2013 mengamanatkan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah diminta untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Sedangkan dalam PP No. 71/2010 disebutkan SAP berbasis akrual dilaksanakan empat tahun setelah tahun 2010, yang artinya dilaksanakan pada awal tahun 2015. Sementara itu, beberapa hal yang harus disiapkan terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual di daerah, yakni ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Kemendagri, 2014).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar 12 persen yaitu dari 58% pada LKPD Tahun 2015

menjadi 70% pada LKPD Tahun 2016. Pada LKPD Tahun 2015, sebanyak 313 dari 542 LKPD yang memperoleh opini WTP (58%), sedangkan pada LKPD Tahun 2016 sebanyak 375 dari 537 LKPD yang memperoleh opini WTP (70%). Selain kenaikan jumlah opini WTP, juga terjadi kenaikan opini dari opini Tidak Wajar (TW) atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 15 LKPD (BPK, 2017).

Gambar 1.1  
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2015 – 2016



(Sumber: Badan Pemerika Keuangan, 2017)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian

(WDP/*Qualified opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*). Menurut BPK (2017) Opini Wajar Tanpa Pengecualian diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Opini Wajar Dengan Pengecualian diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Opini Tidak Menyatakan Pendapat diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, atau Tidak Wajar. Adapun opini Tidak Wajar diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos

laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP (BPK, 2017).

Mulai tahun 2005 pemerintah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas kepada rakyat terhadap pengelolaan keuangan negara khususnya atas hak dan kewajiban negara/daerah yang dapat dinilai dengan uang, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Ichlas, 2014).

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Banten  
Tahun Anggaran 2015 - 2016**

No	Entitas Pemerintah Daerah Propinsi Banten	Opini LKPD	
		2015	2016
1	Kab. Lebak	WTP	WTP
2	Kab. Pandeglang	WDP	WTP
3	Kab. Serang	WTP	WTP
4	Kab. Tangerang	WTP	WTP
5	Kota Cilegon	WTP	WTP
6	Kota Tangerang	WTP	WTP

(Sumber: BPK, 2017)

Dalam Tabel 1.1 penilaian BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam situs resmi Pemerintah Kota Tangerang untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan oleh beberapa pihak untuk berbagai macam kepentingan, yaitu pihak pemerintah untuk mengevaluasi kinerja karyawan dan pengambilan keputusan, masyarakat untuk memonitor kinerja dan pertanggungjawaban pemerintah atas uang rakyat (pajak), serta BPK atau auditor untuk memberikan penilaian dan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi penting bagi berbagai pihak, maka laporan keuangan yang disusun harus berkualitas. Menurut penelitian terdahulu, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah.

Kualitas laporan keuangan adalah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan karakteristik kualitatif yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang terdapat di Standar Akuntansi Pemerintahan laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila terdapat karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan. Laporan keuangan

yang relevan adalah laporan keuangan yang informasinya memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi pencapaian di masa lalu, dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, disajikan tepat waktu, dan lengkap, sehingga dapat mempengaruhi pengguna mengambil keputusan yang lebih berkualitas. Laporan keuangan yang andal adalah laporan keuangan yang disajikan secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan di dalam laporan keuangan, dapat diuji lebih dari satu kali dengan hasil yang tidak jauh berbeda, dan tidak merugikan atau menguntungkan pihak tertentu. Laporan keuangan dapat dibandingkan yaitu laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya dan dengan entitas lain pada umumnya. Laporan keuangan mudah dipahami adalah laporan keuangan yang dapat dipahami dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan batas pemahaman penggunaannya.

Menurut penelitian terdahulu, faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah salah satunya adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari penyajian laporan keuangan, laporan realisasi Anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi aset tetap, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, akuntansi kewajiban, koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi

akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan, laporan keuangan konsolidasian dan laporan operasional.

Dalam penelitian ini penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diukur dengan melihat penerapan atas pernyataan yang ada di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan standar akuntansi pemerintah adalah penggunaan prinsip-prinsip yang tertera pada standar akuntansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan terkait penyajian laporan keuangan menyatakan laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi pencapaian sasaran dimasa lalu dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran di tahun berikutnya. Pernyataan 01 SAP menyatakan penyajian laporan keuangan harus disajikan secara terstruktur dan juga informasi harus diidentifikasi secara jelas. Penerapan 01 SAP membuat laporan keuangan dapat dibandingkan dan mudah dipahami, sehingga semakin baik penerapan SAP membuat kualitas laporan keuangan menjadi meningkat. Suwita dan Arnan (2015), Sudirianti dkk (2015), dan Ichlas dkk (2014) telah membuktikan bahwa tingginya penerapan standar akuntansi pemerintahan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis



lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson, 2000 dalam Yosefrinaldi, 2013). Menurut Utama (2015), beberapa manfaat teknologi informasi antara lain komunikasi yang tak terkendala jarak, kemudahan mendapatkan informasi dari internet, dan berita dari berbagai belahan dunia dapat disebarkan secara cepat bahkan *real time*. Nurillah dan Muid (2014) mendefinisikan pemanfaatan teknologi informasi sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan teknologi informasi yaitu komputer dan jaringan internet dalam mengolah data dan menghasilkan informasi yang berkualitas.

Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi proses akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara komputerisasi agar dapat mempercepat penyusunan laporan keuangan dan juga komputerisasi yang didukung dengan penggunaan aplikasi (*software*) dapat meminimalisir kesalahan pencatatan. Ketika kesalahan pencatatan dapat diminimalisir dan penyajian laporan keuangan dapat lebih dipercepat membuat laporan keuangan semakin andal dan relevan sehingga semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, kualitas laporan keuangan semakin meningkat. Nurillah dan Muid (2014) dan Yosefrinaldi (2013) telah membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Almasri (2016) Sumber Daya Manusia (SDM) adalah tenaga kerja yang menduduki suatu posisi atau orang-orang yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan pada organisasi tertentu. Menurut Yosefrinaldi (2013), kapasitas SDM adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Menurut Agoes dan Ardana (2014) kompetensi dapat diartikan sebagai penguasaan dan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan profesinya sehingga menumbuhkan kepercayaan publik. Menurut Yensi (2014) kompetensi SDM adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugasnya. Dapat disimpulkan kompetensi SDM adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas sesuai dengan pedoman yang diberikan berdasarkan pengalaman dan pelatihan yang sudah diterima. SDM yang berkompeten dapat bertanggung jawab atas tugas yang dikelolanya akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku secara lengkap dan wajar dan membuat laporan keuangan relevan dan andal, sehingga semakin baik kompetensi SDM, kualitas laporan keuangan semakin meningkat. Nurillah dan Muid (2014) dan Hadiputro dan Octavia (2015) telah membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas diperlukan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menurut PP No. 60 tahun 2008, SPIP terdiri atas unsur :

1. lingkungan pengendalian
2. penilaian resiko
3. kegiatan pengendalian
4. informasi dan komunikasi
5. dan pemantauan

Lingkungan pengendalian sendiri berarti Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif (menerapkan aturan perilaku) dan kepemimpinan yang kondusif (merespon secara positif terdapat pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan). Penilaian resiko mewajibkan Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan penilaian resiko yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Kegiatan pengendalian mengartikan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Informasi dan Komunikasi membuat Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Pemantauan dilaksanakan pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya oleh Pimpinan Instansi Pemerintah.

Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yaitu penggunaan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 dalam instansi pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam menerapkan kode etik dan melakukan penilaian risiko untuk mengendalikan lingkungan internal. Dalam pernyataan lingkungan pengendalian, instansi pemerintah akan meningkatkan kedisiplinan karyawan dengan menerapkan kode etik secara tertulis dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan transaksi – transaksi yang benar terjadi sehingga informasi dalam laporan keuangan menggambarkan secara jujur/wajar dan membuat laporan keuangan menjadi relevan dan andal sehingga semakin baik penerapan SPIP maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin meningkat. Evicahyani dan Setiawina (2016) dan Nurillah dan Muid (2014) telah membuktikan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditujukan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. (Nordiawan, 2010)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam penelitian ini menggunakan aplikasi komputer yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang diciptakan oleh

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sistem akuntansi keuangan daerah dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 secara lengkap dan membuat laporan keuangan menjadi relevan dan dapat dibandingkan secara internal maupun eksternal sehingga semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan semakin meningkat

Nurillah dan Muid (2014) telah membuktikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Suwita dan Arnan (2015) yang memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Penambahan variabel independen pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia yang mengacu pada penelitian Nurillah dan Muid (2014), penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang mengacu pada penelitian Evicahyani dan Setiawina (2016), sistem akuntansi keuangan daerah yang mengacu pada penelitian Nurillah dan Muid (2014). Variabel – variabel tersebut ditambahkan karena variabel tersebut juga merupakan aspek yang penting dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.
2. Objek yang digunakan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Tangerang. Penelitian sebelumnya adalah Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. Obyek ini dipilih karena wilayah kota Tangerang memperoleh opini

WTP selama 9 tahun berturut – turut dan kabupaten Tangerang memperoleh opini

WTP selama 8 tahun berturut – turut.

3. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018, sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2015.

Berdasarkan uraian – uraian latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah:

**“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi Empiris pada SKPD Wilayah Tangerang).**

## **1.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat di pengaruhi oleh banyak faktor, tetapi dalam penelitian ini menggunakan 5 faktor, yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wilayah Kabupaten Tangerang. Responden yang dipilih yaitu pegawai yang ikut serta dalam penyusunan laporan keuangan, menerapkan standar

akuntansi pemerintah, dan menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan di SKPD wilayah Tangerang.

3. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada pemerintah daerah khususnya kepada SKPD wilayah Kabupaten Tangerang dalam menyusun laporan keuangan lebih berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, melakukan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah, agar penyusunan laporan keuangan akan menjadi lebih berkualitas dan informasi pada laporan keuangan dapat berguna dalam pengambilan keputusan.



## 2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi konseptual bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemajuan dunia pendidikan akuntansi khususnya untuk sistem informasi akuntansi.

## 3 Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima bab, masing-masing berisi uraian sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : TELAAH LITERATUR

Bab ini terdiri atas penjelasan pembahasan secara rinci terkait tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah daerah. Teori terkait laporan keuangan pemerintah daerah, standar akuntansi pemerintah, teknologi

informasi, sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang di dalamnya terdapat indicator pengukuran masing – masing variabel independen dan pengaruhnya terhadap variabel dependen, serta pengembangan hipotesis dan model penelitian.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, unit analisis yang digunakan, populasi dan sampel yang dipakai, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, serta metode statistic yang digunakan untuk menganalisis data.

### BAB IV : ANALIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari objek penelitian, deskripsi penelitian berdasarkan data – data yang dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

### BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini terdiri atas simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.